

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SARANA
DAN PRASARANA OLAH RAGA PADA AKADEMI SEPAK BOLA
SEKAYU (SYSA) KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Oleh :

Heriyanto¹, Rian Agustianto²

heriyanto.radien@gmail.com

Jurusan Administrasi Bisnis, Prodi DIV Administrasi Negara, Politeknik Negeri
Pontianak¹

Kalimantan Barat Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten
Musi Banyuasin²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Akademi Sepakbola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang lainnya. Analisis yang digunakan kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah untuk memperoleh kesimpulan. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Penelitian ini adalah menganalisa peran pemerintah dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga pada Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan observasi pada penelitian ini ditemukan bahwa Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga sangat berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dimana pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga telah dilaksanakan dengan baik dan efektif serta sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 dengan visi dan misi yang berorientasi pada Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Kata Kunci ; Pengelolaan , Sarana dan Prasarana , Olahraga

A. PENDAHULUAN

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meletakkan titik berat otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota.

Penerapan Otonomi daerah sendiri memiliki tujuan mendekati pelayanan kepada masyarakat. Sebagai konsekuensinya maka perlu dibentuk daerah-daerahotonom dalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi yang dibagi atas kabupaten dan kota dimana masing-masing kabupaten dan kota memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri.

Kabupaten dan kota dalam menyelenggarakan fungsi - fungsi pemerintahan terutama dalam menjalankan otonomi daerah dibekali hak dan

diharuskan memenuhi kewajiban. Hak-hak tersebut meliputi ; mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pemimpin daerah; mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, serta mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan kota. Salah satu poin penting yang harus lebih dicermati yaitu pada sektor olahraga. Seiring dengan kemajuan zaman maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Hal ini mutlak harus dipenuhi dalam rangka menyongsong era globalisasi di masa depan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga yang baik dan memperbaiki manajemen pengelolaannya.

Kebijakan otonom daerah dipegang oleh pemerintah daerah. (Aridhayandi, 2018; Hidayaturrahman et al., 2020; Luthviati, 2020), yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan kota, termasuk pada sektor olah raga. Sebagai pemerintah daerah mempunyai pelayanan yang penting bagi masyarakatnya. (Walker and Andrews, 2015; Blom-Hansen et al., 2016; Carr, 2015). Pemerintah daerah dalam hal memberikan pelayanan olah raga kepada masyarakat adalah dalam hal pengelolaannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keolahragaan Nasional Bab VIII pasal 34 ayat 1 dan 2, bahwa Pemerintah Kabupaten/

kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal. Sekurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau internasional. Salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang melayani keinginan masyarakat dalam hal olah raga adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Program yang diluncurkan oleh pemerintah daerahnya dalam olah raga, terdiri dari; (1) program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga; (2) program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; serta (3) peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Ketiga program diatas menjadi sasaran utama dalam meningkatkan potensi dan prestasi olahraga, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah, sekaligus mendukung visi MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022 Sebagaimana diketahui bahwa komitmen meningkatkan potensi olahraga dipicu oleh keikutsertaan Muba pada event olahraga akbar yaitu sebagai Pelaksana PON XVI Sumsel 2004 untuk tujuh cabang olahraga yaitu; balap motor, terbang layang, tenis meja, berkuda, renang, loncat indah dan selam. Konsekuensinya adalah, sarana dan prasarana pendukungnya turut dibangun. Sarana dan prasarana tersebut dibangun dengan standar nasional dan internasional yaitu; Kolam renang, stable berkuda, lapangan terbang, sirkuit, wisma atlet, sementara itu sarana dan prasarana yang direnovasi antara lain gedung olahraga dan stadion olahraga. Indikator keberhasilan pengelolaan prasarana olahraga adalah seberapa banyak event olahraga atau kejuaraan dilaksanakan.

Berdasarkan pengamatan, setelah dilaksanakannya PON XVI Sumsel tahun 2004 hingga saat ini frekuensinya menurun baik tingkat kabupaten, provinsi maupun

nasional. Kota Sekayu sebagai ibukota Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan kota olahraga memiliki masyarakat yang mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap perkembangan dunia olahraga sepakbola. Olahraga sepakbola sendiri sudah menempati posisi yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kota Sekayu bahkan meningkatnya minat masyarakat ditunjukkan dengan adanya Akademi sepakbola di Kota Sekayu.

Akademi sepakbola Sekayu (SYSA) sebagai salah satu lembaga pendidikan dibidang olahraga khususnya sepakbola di Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal ini dibawah naungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga sepakbola ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga Stadion di Sekayu bahkan terjadinya kecenderungan menurunnya kualitas olahraga karena kurangnya perawatan. Sehingga atlet-atlet sepakbola berlatih dengan fasilitas seadanya. Hal tersebut dapat menghambat perkembangan olahraga di Sekayu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berikut merupakan data atau gambaran Stadion Serasan Sekate yang mengalami penurunan.

Lemahnya pengelolaan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas pada Akademi sepakbola Sekayu (SYSA) tidak terlepas dari pengelolaan di organisasi itu sendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga pada Akademi sepakbola Sekayu (SYSA) merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan keolahragaan sebagaimana yang diharapkan semua pihak baik bagi pengelola, pelatih, dan atlet. Fasilitas sarana dan prasarana yang

memadai akan sangat membantu dalam meningkatkan sebuah prestasi, apa bila sarana tersebut telah di tunjang dengan baik maka sebuah prestasi akan bisa tercapai dengan semestinya. Dalam hal ini Sarana dan Prasarana yang menunjang Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin belum begitu maksimal sehingga menyebabkan belum tercapainya sebuah prestasi yang dimiliki oleh Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan sarana dan prasarana olahraga di Akademi Sepakbola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Manajemen adalah sebagai pengelolaan, yang hampir setiap lembaga masing-masing mempunyai manajemen tersendiri, sekaligus sebagai pembeda antara lembaga satu dengan lainnya.

Manajemen yang baik dari hasil pengelolaan dalam sebuah lembaga atau organisasi, maka dapat menjadikan lembaga tersebut bermutu. (Hifza et al., 2020; Hifza and Aslan, 2020). Namun, dalam hal manajemen pada setiap organisasi atau lembaga, maju mundurnya sebuah organisasi tergantung dari kepemimpinannya. (Dewi et al., 2020; Hifza et al., 2020). Perbedaan pemimpin, maka menghasilkan perbedaan juga dalam hal pengelolaan, termasuk olah raga. Pengelolaan olah raga bagi pemerintah daerah berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk

mengkoordinir sumber daya organisasi untuk mengelola sarana dan prasarana olahraga.

Koordinasi dimaksudkan agar tujuan bisa tercapai dengan efisien sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pihak (*Stakeholders*) yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Sementara, sarana prasarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses olahraga, khususnya proses berlatih melatih dan penyelenggaraan pertandingan, seperti sarana prasarana indoor dan outdoor.

Manajemen sarana dan prasarana olahraga dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama pendayagunaan semua sarana dan prasarana secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana perlu didayagunakan dan dikelola untuk kepentingan proses berlatih, melatih dan pertandingan. Pengelolaan ini dimaksud agar dalam menggunakan prasarana olahraga berjalan dengan efektif dan efisien.

Mengelola sarana dan prasarana olahraga minimal ada 4P yang selalu terkait yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Pertama, produk. Barang (Paket yang menarik) dan Jasa (Pelayanan yang berkompeten dan Profesional, proses simpel dan cepat dan bukti fisik pemeliharaan selalu terjaga). Kedua, harga atau tarif yang kompetitif (*Price*). Sebuah nilai pengganti yang harus dibayarkan seseorang, saat mendapatkan produk yang memiliki manfaat untuknya. Ketiga, distribusi yang tepat (*Place*). Suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan. Keempat, tepat Sasaran (*Promotion*). Suatu usaha untuk

mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkan.

Sarana Prasarana Olahraga

Sarana prasarana olah raga meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Adanya kebijakan tentang olah raga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi klub dan masa. (Wicker et al., 2013). Sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk perlengkapan olah raga. Sarana prasarana olahraga yang baik dapat menunjang pertumbuhan masyarakat yang baik.

Keadaan sarana prasarana olahraga di Indonesia, menurut pengamatan ada dua faktor yang dapat berdampak positif dalam penyiapan prasarana olahraga sebagai berikut; Pertama, adanya konsep mengenai Otonomi Daerah yang telah dituangkan dalam Undang-Undang. Kedua, adanya ketentuan bahwa tuan rumah untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) sejak tahun 2000 ditetapkan daerah secara bergantian.

Sarana prasarana yang ada di Indonesia kurang mendapat perhatian secara khusus dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kompleks. Kenyataannya dapat dilihat pada ketidak berhasilan Kota Surabaya dalam membangun kawasan "Sport Complex" baru yang akan digunakan untuk menyelenggarakan PON XV -2000 akibat keterbatasan biaya. Keterbatasan ini disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia. Pelaksanaan ini terpaksa harus dialihkan ke Stadion Delta yang ada di Sidoarjo. Stadion ini digunakan untuk seluruh

kegiatan PON yang berlangsung, baik upacara pembukaan, penutupan maupun pertandingan-pertandingan. Jelas dalam hal ini sarana prasarana di Indonesia sangatlah minim akan semua fasilitasnya.

Pada PON XVI -2004 dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dan kota Palembang sebagai pusat dari penyelenggaraan pertandingan. Pada tahun 1978 dibangun Stadion Bumi Sriwijaya yang pada awalnya direncanakan untuk diklembangkan menjadi Stadion Utama tetapi pada akhirnya ditetapkan sebagai Stadion Atletik untuk dibangun lintasan atletik dengan bahan sintetis, sedangkan Stadion Utama direncanakan dibangun di Seberang Ulu di wilayah Jakabaring. Upaya pembangunan Stadion Utama Jakabaring di seberang Ulu dimaksudkan untuk mengembangkan kota kearah selatan di areal reklamase sesuai dengan rencana Induk Kota yang telah disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum.

Untuk Sport Complex telah dipersiapkan lahan reklame seluas 50 Ha yang nantinya akan dipakai untuk lokasi Stadion Utama dan dua buah gedung Olahraga yang dipergunakan untuk Senam dan cabang olahraga Bulutangkis. Selain itu ada beberapa sarana prasaran olahraga outdoor untuk olahraga : voli pantai, soft ball, hoki dan lain-lain yang akan dapat ditampung. Diseberang kompleks stadion itu, sedang dibangun perumahan sebanyak 1.000 buah yang nantinya akan digunakan untuk PON XVI -2004 yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal sementara atlet-atlet selama PON berlangsung. Setelah selesai kegiatan PON, maka perumahan ini akan dijual pada masyarakat untuk dijadikan pemukiman. Meskipun pembangunan sarana prasarana olahraga sedikit terhambat namun penggunaan bahan-bahan sarana prasarana olahraga cukup baik, misalnya saja yang

telah disebutkan di atas mengenai penggunaan lantai dari bahan sintetis.

Kompleks Gelora Bung Karno di Senayan Jakarta memiliki luas lahan 279 Ha, sebagai areal dengan luas 155 Ha adalah lahan untuk kompleks olahraga yang sampai saat ini masih merupakan kompleks olahraga yang terlengkap dan terbesar di seluruh Indonesia. Pada saat PON di Jakarta pada tahun 1996 didalam kompleks Stadion dapat diselenggarakan 18 cabang olahraga yang dipertandingkan. Stadion ini sampai saat ini dari waktu ke waktu secara bertahap dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan olahraga.

Pengembangan dan pembangunan sarana prasaran olahraga tetap mengikuti perkembangan jaman, beberapa sarana prasarana olahraga yang telah diikutsertakan dalam kompetisi luar negeri dan memperoleh penghargaan adalah sebagai berikut; Pertama, gedung Pusat Latihan Bulutangkis, memperoleh IAKS Award pada tahun 1989 untuk kategori B. "Training For Top-level Sport". Kedua, gedung/Lapangan Menembak, memperoleh "Bronz Award" untuk kategori F. "Training and Competition Facilities for special sport disciplines". Ketiga, lapangan Latihan Softball/Baseball, memperoleh IOC/IAKS Bronze Award tahun 1999 untuk kategori F, "Training and Competition Facilities for special sport disciplines".

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang lainnya. (Sugiyono, 2007; Aslan, 2019). Analisis yang digunakan kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang bertujuan menggambarkan mengenai

keadaan tertentu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah untuk memperoleh kesimpulan. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi peneliti sehingga tidak terjebak pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan. Selain itu penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih mana data yang relevan dan mana pula yang tidak, meskipun mungkin menarik tetapi tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan. (Meleong, 2008). Data primer dan sekunder penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Tenaga Pelatih dan Atlet Sepakbola.

Informan dapat disamakan sebagai partisipan penelitian, yaitu subyek penelitian dimana dari mereka data penelitian diperoleh. (Arikunto, 1999; Bungin, 2007). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara, teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Menurut Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, (1998), analisis data kualitatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahapan-tahapan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, terdiri dari beberapa tahapan, yakni reduksi data, display data dan verifikasi. (Nasution, 1998).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dilapangan, Analisis Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Akademi Sepakbola Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin didasarkan dari beberapa dimensi yang menghasilkan beberapa indikator, antara lain meliputi :

1. Perencanaan

Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Akademi Sepakbola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dapat dilihat dari semakin baiknya pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dapat dilihat dari :

a. Musyawarah Perencanaan

Musyawah perencanaan tidak selalu didasari oleh kebutuhan masyarakat, melainkan ada juga didasari dengan unsur politik. Tapi dari semua itu musyawarah sangat berguna bagi masyarakat, dikarenakan pemerintah bisa lebih mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan dalam sebuah pembangunan. Musrenbang dan pelaksanaan setiap program pemerintah sangat ditentukan dari perencanaan, pengelolaan sarana prasarana olahraga sangat tergantung dari kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah hal ini terlihat dari penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui dinas yang terkait.

Pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga di Musi Banyuasin dengan tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten untuk membiayai pengelolaan Akademi Sepak bola Sekayu.

b. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh pemerintah pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan Lain-lain.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. George Terry (dalam Manulang 2005:3). Pengorganisasian (Organizing) merupakan suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di pandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Adapun peran pemerintah kabupaten Musi Banyuasin pada adalah menunjuk "Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pengelola sarana dan prasarana olahraga di kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 09 tahun 2009 tentang penunjukan pengelola sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin Guna mendukung Visi MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022.

3. Pengarahan

Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberi petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan juga merupakan suatu keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi sebuah tujuan.

Demi untuk menunjang kelancaran dan pertanggungjawaban proses administrasi, pelaksanaan lapangan, maka dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang penetapan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan Koordinator Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu juga Setiap Sarana dan Prasarana Olahraga di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Selain sudah adanya Pengelola dan Tenaga Kebersihan, adanya juga tenaga Pemotong Rumput, sehingga bisa terjaga kondisi rumput pada Sarana dan Prasarana Olahraga dan Stadion Serasan Sekate Sekayu.

4. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar

pelaksanaan tujuan, dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No.50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 09 tahun 2009 tentang penunjukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pengelola sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin dilanjutkan dengan diturunkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (2000:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan

dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Akademi Sepakbola Sekayu (SYSA) Kabupaten Musi Banyuasin perlu dilaksanakan dengan baik oleh Pengelola agar dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Pentingnya memperhatikan aspek pengelolaan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai pada tahap pengawasan kegiatan, terutama karena belum optimalnya perubahan hasil yang diharapkan.

Kebijakan Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana diketahui adalah merupakan kebijakan Pemerintah yang mempunyai tujuan yaitu agar tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang layak. Tujuan ini dirangkaikan dengan upaya meningkatkannya sistem pengelolaan sarana dan prasarana olahraga.

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : PER-0200.D/MENPORA/6/2009 tentang Tata Kelola Lembaga Keolahragaan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Musi Bayuasin mengacu pada Rencana Strategis tahun 2017-2022 dengan visi dan misi yang berorientasi pada Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

E. KESIMPULAN

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA) ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung teramatlah penting untuk mendukung tercapainya tujuan berupa pembinaan dan sebuah prestasi yang akan diukir dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini Dispopar Kab. Muba yang mengelola sarana dan prasarana tersebut harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari *Planing, Organizing, Actuating dan Controlling* (POAC). Fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan akan menjadi sebuah evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menjadi sebuah kebijakan yang akan dibuat kemudian hari. Melalui perencanaan yang baik akan tercipta pengelolaan yang baik pula. Penempatan sumber daya manusia yang mendukung dalam mengelola serta menggerakkan sebuah organisasi untuk mengawasi secara berkesinambungan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA). Fungsi tersebut akan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh agar terkelolanya sarana dan prasarana pendukung yang ada di Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA) agar lebih kompeten dan mampu mendukung Akademi Sepak Bola Sekayu (SYSA) lebih berprestasi lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M.R., 2018. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *J. Huk. Pembang.* 48, 883–902. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol48.No4.1807>
- Arikunto, S., 1999. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Aslan, 2019. Pergeseran Nilai Di Masyarakat Perbatasan (Studi Tentang Pendidikan Dan Perubahan Sosial Di Desa Temajuk Kalimantan Barat) [Www Document]. Url <https://idr.uin-antasari.ac.id/10997/> (Accessed 5.11.20).
- Blom-Hansen, J., Houlberg, K., Serritzlew, S., Treisman, D., 2016. Jurisdiction Size And Local Government Policy Expenditure: Assessing The Effect Of Municipal Amalgamation. *Am. Polit. Sci. Rev.* 110, 812–831.
- Bungin, B., 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Carr, J.B., 2015. What Have We Learned About The Performance Of Council-Manager Government? A Review And Synthesis Of The Research. *Public Adm. Rev.* 75, 673–689.
- Dewi, N.C., Aslan, Suhardi, M., 2020. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak. *Jmsp J. Manaj. Dan Supervisi Pendidik.* 4, 159–164.
- Hidayatullah, M., Hidayat, I., Wibisono, A., 2020. Why Development Failed? Facts And Analysis Of Development Failure In Sumenep. *J. Ekon. Pembang.* 18, 17–38.
- Hifza, Aslan, 2020. The Model Of Competitive Advantage Development In Private Islamic Education Institutions. Presented At The Proceedings Of The Third International Seminar On Recent Language, Literature, And Local Culture Studies, Basa, 20-21 September 2019, Surakarta, Central Java, Indonesia.

- [Http://Dx.Doi.Org/10.4108/Eai.2019.2297058](http://dx.doi.org/10.4108/Eai.2019.2297058)
- Hifza, Juliana, Palapa, A., Maskur, Aslan, 2020a. The Strategic Foundation For Competitive Excellent Development In Integrated Islamic Primary Schools In Indonesia. *Int. J. Adv. Sci. Technol.* 29, 1747–1753.
- Hifza, Suhardi, M., Aslan, Ekasari, S., 2020b. Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Interdisipliner. *Nidhomul Haq J. Manaj. Pendidik. Islam* 5, 46–61. <https://doi.org/10.31538/Ndh.V5i1.518>
- Luthviati, R.D., 2020. The Role Of Local Governments In The Defense Of Leading Products. *Bestuur* 8, 121–128.
- Meleong, L.J., 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, 1998. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Tarsito, Bandung.
- Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, 1998. *Qualitative Research For Education: An Introduction To Theory And Methods*. Aliyn And Bacon, Inc., Boston.
- Sugiyono, 2007. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Walker, R.M., Andrews, R., 2015. Local Government Management And Performance: A Review Of Evidence. *J. Public Adm. Res. Theory* 25, 101–133. <https://doi.org/10.1093/Jopart/Mut038>
- Wicker, P., Hallmann, K., Breuer, C., 2013. Analyzing The Impact Of Sport Infrastructure On Sport Participation Using Geo-Coded Data: Evidence From Multi-Level Models. *Sport Manag. Rev.* 16, 54–67